**EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESSA DI DESA SUKANAGARA KECAMATAN PADAHERANG
KABUPATEN PANGANDARAN**

Obang Subadra¹, Asep Nurwanda², Regi Refian Garis³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia¹⁾²⁾³⁾

e-mail: subadra_obang@gmail.com

Submitted: 10-11-2024, Reviewed: 15-11-2024, Published: 29-11-2024

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pengawasan oleh BPD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sukanagara belum efektif. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Informan sebanyak 6 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : BPD belum efektif dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa hal ini disebabkan adanya dimensi yang belum dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan seperti pada dimensi menentukan kebutuhan akan tindakan koreksi dalam melaksanakan proses pengawasan penggunaan APBDes karena adanya kecenderungan BPD menunggu laporan pertanggungjawaban kepala desa selain itu BPD kurang cepat memberikan koreksi apabila ditemukan penyimpangan dalam penggunaan APBDes. Adanya hambatan-hambatan BPD dalam melaksanakan proses pengawasan penggunaan APBDes yang antara lain belum semua anggota BPD memahami mekanisme penggunaan APBDes karena kurangnya pelatihan bagi anggota BPD.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengawasan, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa

PENDAHULUAN

Pemerintah Desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintah daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran penting dalam pemberdayaan pemerintahan yaitu memberikan masukan kepada Pemerintah Desa mengenai hal-hal yang perlu ditetapkan untuk menjadi suatu program demi kemajuan Desa, berkoordinasi dengan Pemerintah Desa, pembinaan masyarakat untuk mendukung masyarakat mengadakan pembinaan terhadap jalannya program kerja, mengadakan evaluasi terhadap jalannya program kerja dengan mengadakan pengawasan dan pengamanan secara langsung.

BPD merupakan lembaga di luar organisasi pemerintahan desa namun memiliki hubungan kemitraan dengan pemerintahan desa yang bertujuan untuk mendukung dan mengawasi kinerja kepala desa dan mengontrol penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah desa. BPD memiliki kewenangan untuk merancang dan menyepakati peraturan desa bersama dengan kepala desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa oleh kepala desa terutama mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa (APDes) serta jalannya pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa pada hakikatnya adalah mitra kerja Kepala Desa dalam menjalankan urusan Pemerintahan Desa dan memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di Desa, demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan kepentingannya oleh Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga masyarakat lainnya. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) disebutkan bahwa BPD adalah lembaga yang mempunyai fungsi pemerintahan. Fungsi inilah yang menjadikan BPD sebagai lembaga yang turut menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bersih, transparan dan partisipatif serta tertib.

Peraturan yang mengatur tentang BPD salah satunya yang terdapat dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengenai fungsi dari BPD yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. BPD memiliki peranan sangat penting, sebagai wadah bagi anggota masyarakat yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi pada penyelenggaraan pemerintahan.

Peraturan yang baru mengenai BPD yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD. Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 10 Januari 2017. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pengaturan BPD untuk mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan menolong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di desa.

Kehadiran BPD dalam Pemerintahan Desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan sistem check and balances dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Begitu pula halnya dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) diperlukan fungsi BPD sebagai pengawas agar anggaran tersebut tersalurkan untuk kepentingan pembangunan di desa. Pengawasan yang dijalankan oleh BPD terhadap pemakaian anggaran desa dilakukan dengan melihat rencana awal program dengan realisasi pelaksanaannya. Kesesuaian antara rencana program dengan realisasi program dan pelaksanaannya serta besarnya dana yang digunakan dalam pembiayaannya adalah ukuran yang dijadikan patokan BPD dalam melakukan pengawasan. Selama pelaksanaan program

pemerintah dan pemakaian dana desa sesuai dengan rencana maka BPD mengangapnya tidak menjadi masalah.

Dengan demikian BPD akan berfungsi sebagai sebuah lembaga yang mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pembangunan di desa, kemudian akan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kepala Desa sebagai eksekutif, melalui sebuah mekanisme kontrol dari BPD, hingga pada penerimaan laporan pertanggungjawaban pelaksana kepada BPD.

Begitupula halnya dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sukanagara maka BPD harus berperan dengan baik dalam melaksanakan fungsi pengawasan sehingga penggunaan APBDes sesuai dengan yang telah direncanakan. Desa Sukanagara adalah Desa yang terletak di Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah dengan jarak dari ibu kota kecamatan sekitar 7 km. Pada tahun 1979 Desa Sukanagara adalah hasil pemekaran dari Desa Paledah. Sebelum tahun 1979 Desa Sukanagara masih masuk wilayah Desa Paledah. Dan sekarang Desa Sukanagara terdiri dari enam dusun yaitu : Dusun Sentul, Dusun Sindangrasa, Dusun Sukanagara, Dusun Sukajadi, Dusun Sukasari dan Dusun Ciledug.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Alokasi pengeluaran dalam APBDes meliputi belanja pembangunan dan pos pengeluaran rutin. Belanja pembangunan meliputi (1) pos sarana pemerintahan desa; (2) pos prasarana perhubungan; (3) pos prasarana pemasaran; (4) pos prasarana sosial. Belanja rutin meliputi (1) pos belanja pegawai; (2) pos belanja barang; (3) pos biaya pemeliharaan; (4) pos biaya perjalanan dinas; (5) pos belanja lain-lain; (6) pos pengeluaran tak terduga

KAJIAN PUSTAKA

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang dibentuk untuk mewakili aspirasi masyarakat sekaligus melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu fungsi utama BPD adalah memastikan tata kelola desa berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Efektivitas pengawasan BPD ditentukan oleh berbagai faktor, seperti pemahaman anggota terhadap tugas dan fungsi mereka, hubungan dengan pemerintah desa, serta dukungan masyarakat dalam proses pengawasan. Studi oleh Yulianto (2019) menyebutkan bahwa keberhasilan pengawasan BPD seringkali bergantung pada kemampuan mereka menjalin komunikasi yang baik dengan kepala desa dan perangkat desa lainnya.

Dalam konteks Desa Sukanagara, Kecamatan Padaherang, efektivitas pengawasan BPD juga menghadapi tantangan, terutama terkait kapasitas sumber daya manusia dan kesadaran masyarakat terhadap peran BPD. Penelitian oleh Pratama dan Santoso (2020) menunjukkan bahwa di banyak desa, termasuk Desa

Sukanagara, keterbatasan pengetahuan anggota BPD tentang regulasi dan teknik pengawasan seringkali menjadi hambatan utama. Selain itu, kurangnya akses terhadap informasi publik terkait pengelolaan keuangan dan program pembangunan desa juga dapat mengurangi efektivitas pengawasan. Di sisi lain, hubungan yang harmonis antara BPD dan kepala desa dapat menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, beberapa upaya dapat dilakukan, seperti penguatan kapasitas anggota BPD melalui pelatihan dan bimbingan teknis. Menurut penelitian Siregar (2021), pengawasan berbasis partisipasi masyarakat juga dapat menjadi salah satu strategi untuk memastikan proses pembangunan desa berjalan sesuai harapan. Desa Sukanagara dapat memanfaatkan teknologi informasi, seperti sistem laporan berbasis aplikasi, untuk memperkuat transparansi dan mempermudah BPD dalam mengakses data terkait pengelolaan keuangan desa. Dengan peningkatan kapasitas dan kolaborasi yang baik antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat, pengawasan yang dilakukan BPD dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

METODE

Pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif menurut Moleong, (2017: 16) yaitu, penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Menurut Nawawi (2015: 63) mengemukakan bahwa, metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang sedang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Informan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang yang terdiri dari ketua dan anggota BPD, kepala desa dan perwakilan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menetapkan Standar

Standar pengawasan merupakan target yang menjadi acuan perbandingan untuk kinerja di kemudian hari. Standar yang ditetapkan untuk tujuan pengawasan harus diekspresikan dalam acuan yang dapat diukur. Strategi pengawasan harus konsisten dengan tujuan organisasi. Dalam penentuan standar, diperlukan pengidentifikasian indikator-indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran kinerja yang menyediakan informasi yang berhubungan langsung dengan objek yang diawasi. Standar bagi hasil kerja pada umumnya terdapat pada rencana keseluruhan maupun rencana-rencana bagian. Agar standar itu diketahui secara benar, maka standar tersebut harus dikemukakan dan dijelaskan sehingga memahami tujuan yang sebenarnya ingin dicapai.

Proses pengawasan terhadap penggunaan APBDes dilakukan oleh BPD pada saat kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban padahal sebetulnya

BPD dapat langsung menyampaikan laporan kepada pemeritah desa apabila ada kegiatan yang tidak sesuai dengan RAPBDes sehingga setiap permasalahan tidak menumpuk karena diselesaikan pada saat kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Tim Pelaksana Kegiatan harus benar-benar memegang komitmen sesuai dari hasil ketetapan keputusan musyawarah jika ada hal yang kiranya harus adanya perubahan jangan sekali-kali bertindak sendiri tanpa ada musyawarah mupakat begitu juga dalam menentukan suplayer jika sudah ditentukan hasil musyawarah jangan dirubah dan ditentukan suplayernya oleh oleh TPK apalagi oleh sepihak karena itu sudah melanggar kode etik, seperti yang terjadi di Dusun Sindangkasih.

Menurut Handoko (2012:362) menyatakan bahwa : Tahap pertama dalam proses pengawasan adalah menentukan standar pelaksanaan, standar yang dimaksud adalah ukuran patokan yang digunakan untuk menilai hasil-hasil kegiatan yang dilaksanakan. Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap penggunaan APBDes dilakukan melalui penetapan standar hal ini telah sesuai dengan pendapat tersebut artinya BPD memiliki dasar dalam melakukan pengawasan baik aturan-aturan yang ditetapkan serta data-data yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan APDes namun demikian permasalahannya bukan pada standar dalam melakukan pengawasan namun cenderung kepada pemahaman anggota BPD dalam melakukan pengawasan yang masih kurang seperti halnya dasar dalam melakukan pengawasan sebetulnya telah dimiliki seperti RAPBDes yang dimiliki oleh BPD namun pengawasan cenderung dilakukan oleh BPD ketika memperoleh laporan pertanggungjawaban dari kepala desa terhadap penyelenggaraan pemerintah desa padahal sebetulnya BPD dapat melakukan pengawasan ketika program atau kegiatan dilaksanakan mengingat BPD memiliki RAPBDes sebagai standar untuk membandingkan antara pelaksanaan suatu kegiatan dengan rencana kegiatan yang dilaksanakan.

Mengukur Kinerja

Pengukuran kinerja adalah aktivitas konstan dan kontinyu bagi sebagian besar organisasi. Agar pengawasan berlangsung efektif, ukuran-ukuran kinerja harus valid. Kinerja biasanya diukur berbasis kuantitas dan kualitas output, tetapi bagi banyak pekerjaan, pengukuran kinerja harus lebih mendetail. BPD telah mengawasi secara langsung realisasi penggunaan APBDes yang dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat hal ini dikarenakan adanya pelibatan BPD dalam melaksanakan berbagai kegiatan sehingga menyebabkan dapat mengurangi penyimpangan yang terjadi walaupun memang belum sepenuhnya BPD dapat mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi secara cepat karena adanya kecenderungan BPD dalam menunggu laporan pertanggungjawaban kepala desa terhadap setiap kegiatan. Padahal sebetulnya BPD dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa jika hasil pengawasan yang dilakukannya menemukan adanya penyimpangan dan tuntutnya hal ini akan mempercepat penyelesaian masalah.

Menurut Sugiyanto, (2016: 68) menyatakan bahwa, pengukuran kinerja adalah aktivitas konstan dan kontinyu bagi sebagian besar organisasi. Agar pengawasan

berlangsung efektif, ukuran-ukuran kinerja harus valid. Kinerja biasanya diukur berbasis kuantitas dan kualitas output, tetapi bagi banyak pekerjaan, pengukuran kinerja harus lebih mendetail.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa BPD telah melakukan proses dalam melakukan pengawasan seperti dengan melakukan kinerja terhadap penggunaan APBDes dimana dalam melakukan pengawasan menyesuaikan dengan RAPBDes dan melakukan pengecekan secara langsung kelapangan sehingga mengetahui kebenaran dari suatu kegiatan serta melakukan pengawasan secara langsung terhadap penggunaan APBDes sehingga dengan proses tersebut dapat mengurangi penyimpangan dalam penggunaan APBDes. Walaupun demikian tentunya BPD belum dapat mengatasi berbagai permasalahan dalam penggunaan APBDes hal ini tidak lepas dari proses pengawasan yang dilakukan tidak dapat memberikan masukan secara langsung terhadap setiap temuannya namun selalu menunggu laporan yang disampaikan oleh kepala desa dalam laporan pertanggungjawabannya.

Membandingkan Kinerja Dengan Standar

Tahap ini dimaksudkan dengan membandingkan hasil pekerjaan (actual result) dengan standar yang telah ditentukan. Hasil pekerjaan dapat diketahui melalui laporan tertulis yang disusun, baik laporan rutin maupun laporan khusus. Selain itu dapat juga langsung mengunjungi kegiatan untuk menanyakan langsung hasil pekerjaan atau meminta untuk menyampaikan laporannya secara lisan. Kinerja dapat berada pada posisi lebih tinggi dari, lebih rendah dari, atau sama dengan standar. Pada beberapa organisasi, perbandingan dapat dilakukan dengan mudah, misalnya dengan menetapkan standar pencapaian hasil mereka berada pada urutan pertama. Standar ini jelas dan relatif mudah dihitung untuk menentukan apakah standar telah dicapai atau belum. Namun dalam beberapa kasus perbandingan ini dapat dilakukan dengan lebih detail. Jika kinerja lebih rendah dibandingkan standar, maka seberapa besar penyimpangan ini dapat ditoleransi sebelum tindakan korektif dilakukan.

BPD telah melakukan rapat internal BPD untuk menganalisis penggunaan APBDes supaya menghasilkan keputusan sebagai dasar dalam memberikan berbagai masukan kepada pemerintah desa. Begitupula dengan pendapat Siswandi, (2014 :167) menyatakan bahwa, tahap kritis dari proses pengawasan adalah membandingkan kinerja dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini paling mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisis untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa BPD telah melakukan pengawasan dengan baik karena melakukan perbandingan antara kinerja dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Begitupula dalam penggunaan APBDes maka BPD melakukan proses pengawasan dengan membandingkan APBDes dengan RKPDes dan RPJMDes selain itu melakukan komunikasi dengan TPK maupun PPK sebagai pelaksana program sehingga diperoleh informasi yang benar mengenai perencanaan suatu kegiatan yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan rapat internal di BPD untuk menganalisis penggunaan APBDes sehingga BPD menghasilkan suatu keputusan

sebagai dasar dalam menyampaikan masukan-masukan kepada pemerintah desa terkait dengan penggunaan APBDes.

Menentukan Kebutuhan Akan Tindakan Koreksi

Berbagai keputusan menyangkut tindakan korektif sangat bergantung pada keahlian-keahlian analitis dan diagnostis. Setelah membandingkan kinerja dengan standar, pimpinan dapat memilih salah satu tindakan : mempertahankan status quo (tidak melakukan apa-apa), mengoreksi penyimpangan, atau mengubah standar. Tindakan perbaikan diartikan sebagai tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk melaksanakan tindakan perbaikan, maka harus diketahui apa yang menyebabkan penyimpangan.

BPD kurang cepat memberikan koreksi apabila ditemukan penyimpangan dalam penggunaan APBDes hal ini terbukti dengan lambatnya penyelesaian masalah padahal masyarakat telah mengetahui jika ada penyimpangan namun BPD kurang tanggap dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi. Berdasarkan pendapat Sugiyanto, (2016: 68) menyatakan bahwa, berbagai keputusan menyangkut tindakan korektif sangat bergantung pada keahlian-keahlian analitis dan diagnostis. Setelah membandingkan kinerja dengan standar, pimpinan dapat memilih salah satu tindakan perbaikan untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa BPD telah menentukan kebutuhan akan tindakan koreksi dalam proses pengawasan terhadap penggunaan APBDes hal ini dibuktikan dengan permintaan laporan pertanggungjawaban penggunaan APBDes dari pemerintah desa serta memberikan masukan kepada pemerintah desa selaku pengguna APBDes walaupun kurang cepat dalam memberikan koreksi apabila ditemukan penyimpangan dalam penggunaan APBDes karena BPD cenderung menunggu laporan pertanggungjawaban kepala desa sehingga hal inilah yang menyebabkan lambatnya mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi (Dewanto, R. D. T., Nursetiawan, I., & Sunarti, N., 2024).

Dengan demikian dari hasil penelitian terhadap efektivitas fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Sukanagara Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran dapat diketahui bahwa BPD belum efektif dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa hal ini disebabkan adanya dimensi yang belum dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan seperti pada dimensi menentukan kebutuhan akan tindakan koreksi dalam melaksanakan proses pengawasan penggunaan APBDes karena adanya kecenderungan BPD menunggu laporan pertanggungjawaban kepala desa sehingga menyebabkan permasalahan tidak dapat cepat diatasi selain itu BPD kurang cepat memberikan koreksi apabila ditemukan penyimpangan dalam penggunaan APBDes sehingga apabila ada temuan tidak dapat cepat diatasi.

Permasalahan-permasalahan tersebut disebabkan oleh adanya hambatan-hambatan BPD dalam melaksanakan proses pengawasan penggunaan APBDes yang antara lain belum semua anggota BPD memahami mekanisme penggunaan APBDes karena kurangnya pelatihan bagi anggota BPD dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya selain itu tidak semua anggota BPD memiliki waktu luang sehingga menyebabkan kurangnya pengawasan dilakukan secara rutin karena anggota BPD memiliki pekerjaannya masing-masing.

Oleh karena itu adanya upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan BPD dalam melaksanakan proses pengawasan penggunaan APBDes antara lain mengadakan pertemuan-pertemuan dengan BPD di desa lain untuk menambah pemahaman dan wawasan anggota BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta adanya kegiatan pengembangan kapasitas anggota BPD yang bertujuan agar semua anggota BPD memahami tugas dan fungsinya terutama dalam melaksanakan fungsinya selain itu dalam mendukung fungsi pengawasan BPD mengupayakan agar semua pihak dapat diajak bekerjasama sehingga BPD memperoleh informasi yang benar untuk dijadikan dasar dalam menyampaikan berbagai masukan kepada pemerintah desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap efektivitas fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Sukanagara Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran dapat diketahui bahwa BPD belum efektif dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa hal ini disebabkan adanya dimensi yang belum dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan seperti pada dimensi menentukan kebutuhan akan tindakan koreksi dalam melaksanakan proses pengawasan penggunaan APBDes karena adanya kecenderungan BPD menunggu laporan pertanggungjawaban kepala desa sehingga menyebabkan permasalahan tidak dapat cepat diatasi selain itu BPD kurang cepat memberikan koreksi apabila ditemukan penyimpangan dalam penggunaan APBDes sehingga apabila ada temuan tidak dapat cepat diatasi.

Adanya hambatan-hambatan BPD dalam melaksanakan proses pengawasan penggunaan APBDes yang antara lain belum semua anggota BPD memahami mekanisme penggunaan APBDes karena kurangnya pelatihan bagi anggota BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selain itu tidak semua anggota BPD memiliki waktu luang sehingga menyebabkan kurangnya pengawasan dilakukan secara rutin karena anggota BPD memiliki pekerjaannya masing-masing. Oleh karena itu adanya upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan BPD dalam melaksanakan proses pengawasan penggunaan APBDes antara lain mengadakan pertemuan-pertemuan dengan BPD di desa lain untuk menambah pemahaman dan wawasan anggota BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta adanya kegiatan pengembangan kapasitas anggota BPD yang bertujuan agar semua anggota BPD memahami tugas dan fungsinya terutama dalam melaksanakan fungsinya selain itu dalam mendukung fungsi pengawasan BPD mengupayakan agar semua pihak dapat diajak bekerjasama sehingga BPD memperoleh informasi yang benar untuk dijadikan dasar dalam menyampaikan berbagai masukan kepada pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

Hasibuan, Malayu S.P. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara.

Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah. 2018. *Pengantar Manajemen*. Edisi Pertama. Cetakan ke-11. Depok : Prenadamedia Group

Moleong, L. J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya.

Nawawi, Hadari. 2015. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gadjah. Mada University Press.

Handoko, T. Hani. 2012. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. BPFE.

Dewanto, R. D. T., Nursetiawan, I., & Sunarti, N. (2024). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Perdagangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa Melalui Penggunaan Dana Desa Di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. *Jurnal Otonomi*, 1(1), 165-176.

Sugiyanto, 2016. *Evaluasi Kinerja SDM*. PT Refika Aditama

Siswandi. 2018. Mengukur Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Pendekatan Analisa Balance Scorecard (Studi Kasus Pada PT X Jakarta. *Jurnal Lentera Bisnis* Vol. 7, No. 1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa